



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 49 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : kawat delegasi Indonesia ke Konperensi "General Agreement on Tariffs and Trade" tertanggal Torquay, 22 Maret 1951 tentang permintaan untuk memperpanjang mandaat jang diberikan kepada :

1. Mr. W.A. Weeda, Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Kepala Djawatan Bea dan Tjukai dari Kementerian Keuangan,
 2. A.P. Heesterman, Pegawai Urusan Internasional Bea dan Tjukai Bagian Ekonomi Komisariat Agung Republik Indonesia di Negeri Belanda,
 3. Natadiningrat, Pegawai Bagian Ekonomi Komisariat Agung Republik Indonesia di Negeri Belanda,
- 1 s/d 3 untuk menghadiri selandjutnja Konferensi "General Agreement on Tariffs and Trade" di Torquay (Inggris);

Menimbang : Keputusan kami tertanggal 19 September 1950 No.11 tahun 1950;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan (Thesaurier Djenderal), Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memperpanjang mandaat jang diberikan kepada :

1. Mr. W. A. WEEDA,
2. A.P. HEESTERMAN dan
3. NATADININGRAT,

sebagai tersebut dalam Keputusan kami tertanggal 19 September 1950 No.11 tahun 1950, sampai selesai Konperensi tersebut.

SALINAN



- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Perdagangan dan Perindustrian,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
9. Kepala Djawatan Imigrasi,
10. Kepala Kantor Perdjalanan Negeri,
11. Pusat Tata Usaha Pegawai Kementerian Keuangan,
12. Duta Besar Republik Indonesia di London,
13. Komisaris Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage dan

PETIKAN ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA